



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Jend. Sudirman Km 12 Kel. Sindur Kec. Cambai Kode Pos 31114  
Telepon : (0713) 3920019, Fax (0713) 3920019 Prabumulih - Sumatera Selatan

Prabumulih, 27 Desember 2023

Nomor : 526 / 1067 /DKP/XII/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil  
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas  
Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

Kepada Yth.  
Inspektur Daerah Kota Prabumulih  
di-  
Prabumulih

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kota Prabumulih Nomor: 700/344.A.D/Inspektorat.II/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2022, maka dengan ini kami sampaikan Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai berikut:

No	Rekomendasi LHE AKIP oleh APIP	Tindak Lanjut/Rencana Aksi
1	Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sudah melakukan hasil pengukuran atas capaian kinerja yang diharapkan yang tertuang pada LAKIP Tahun 2022 halaman 36.
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah</li><li>- Belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya</li><li>- Dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja level nasional (Bencmarch Kinerja)</li><li>- Belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya.</li></ul>	Menindaklanjuti rekomendasi tersebut bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih : <ul style="list-style-type: none"><li>- Sudah membuat perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2018-2023) yang tertuang pada LAKIP tahun 2022 halaman 47 s/d 55</li><li>- Terkait dengan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatanya bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah menguraikannya yang tertuang pada LAKIP tahun 2022 halaman 61 s/d 63.</li></ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belum sepenuhnya rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti</li><li>- Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja</li><li>- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja</li><li>- Belum dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja</li></ul>	Berdasarkan rekomendasi tersebut bahwa : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih menindaklanjutinya melalui surat tindak lanjut ini.</li><li>- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya yaitu dari predikat B menjadi BB</li><li>- Dinas Ketahanan Pangan akan terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.</li></ul>

No	Rekomendasi LHE AKIP oleh APIP	Tindak Lanjut/Rencana Aksi
	- Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.	

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas,

Suranti, S.P

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 19640325 198708 2 001

# LAMPIRAN



sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Awal tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas ketahanan Pangan Nomor: 16/KPTS/DKP/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
					%
1	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	100	100	100
3	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	93,5	94,8	101,4
4	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	84	85,2	101,43
5	Cakupan Informasi Harga Pangan	%	100	100	100
6	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun	Ton	13	0	0
	Total Capaian				83,86

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 75.00-89.99 ditunjukkan pada: Cakupan informasi harga pangan, Capaian Nilai SAKIP untuk Tahun 2021 yaitu 100% (Nilai BB 73,6) dan Persentase Tindak lanjut Temuan hasil pengawasan dengan capaian kinerja > 90 atau sangat baik. Sedangkan untuk capaian angka PPH Ketersediaan 101,4 % dengan kategori memuaskan, dan PPH Konsumsi pangan sebesar 101,43% dengan kategori



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33,33 %
2	Sesuai Target	50 %
3	Tidak Mencapai Target	16,66 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis terhadap capaian program dan kegiatan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 (empat) sasaran dan sebanyak 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan sasaran secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

#### **Sasaran 1**

**“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah”**

Pencapaian sasaran 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



**Tabel 3.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2019	Realisasi 2019	Target Tahun 2020	Realisasi 2020	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Target Tahun 2023
1	Nilai SAKIP	Predikat	C	CC	C (100%)	B	B (100%)	BB	C (71,56%)	BB	BB (100%)	A
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	0	0	100 (100%)	100	100 (100%)	100	100 (100%)	100	100	100

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu : Nilai SAKIP dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 Capaian Nilai SAKIP untuk Tahun 2022 yaitu 100% (Nilai BB (73,6)) Capaian realisasi ini mencapai dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

Capaian kinerja nyata indikator 2 adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target di dalam perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Persentase capaian program/kegiatan sesuai Sasaran 1 dapat dilihat dari Tabel Berikut:

**Tabel 3.5**  
**Persentase Pencapaian Renstra Sasaran 1**

No	Program/Kegiatan	% Capaian Keuangan 2022
I	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/ Kota	91,9
Jumlah		91,9

Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah” Tahun 2022 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Renstra. Capaian Kinerja dapat dilihat dari 1 indikator yaitu Meningkatnya kualitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



**Sasaran 2.**

**“Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup”**

Pencapaian sasaran strategis 2 (dua). Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2019	Realisasi 2019	Tahun 2020	Realisasi 2020	Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023
1	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	91%	92%	91.31% (98%)	92,50%	95,50% (103,2%)	93%	95,50 % (102,68%)	93,5%	94,8 % (101,4%)	94%

Sasaran Strategis “Meningkatnya Ketersediaan pangan yang Cukup keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu : Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan" adalah sebesar 94,8% dari target sebesar 93,5% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,4 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Ketahanan Pangan maka capaian kinerjanya mencapai 94%. Capaian ini tidak mencapai dari target yang ingin dicapai hal ini disebabkan karena terhambatnya stok karena masa covid-19, pedagang tidak mau menyetok barang banyak.

Diantaranya faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Prabumulih adalah Produksi, Pasokan dari luar daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah yang dimiliki. Diantara ketiga faktor tersebut keberadaan pasokanlah yang merupakan faktor penentu ketersediaan karena produksi dalam daerah dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah relatif rendah. Sedangkan pasokan dari luar tergantung kepada permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh harga dan perubahan iklim global. Kota Prabumulih dengan capaian PPH Ketersediaan di angka 94,8 %



mencerminkan angka ketersediaan yang cukup dan jika dibagi dengan jumlah penduduk kota prabumulih, ketersediaan pangan berada dalam jumlah yang surplus.

**Sasaran 3.**

“Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)”

Pencapaian sasaran strategis 3 (tiga) ”Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)” dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.7**  
**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2019	Realisasi 2019	Tahun 2020	Realisasi 2020	Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023
1	Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	76,51%	78%	80% (102,56%)	80%	83,88% (104,85%)	83%	82,90% (99,88%)	84%	85,2% (101,43%)	85%

Sasaran “Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman” dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu: “Persentase Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi”. Capaian kinerja nyata indikator "Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" adalah Realisasi sebesar 85,2% dari target sebesar 84% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,43%. Capaian kinerja nyata indikator tahun ini meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 82,90%.

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 Pelaksanaan Renstra 2018-2023, capaian kinerja indikator 1 "Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" tahun ini adalah sebesar 85,2 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Ketahanan Pangan makacapaian kinerjanya mencapai 85 %.

Capaian skoring Angka PPH Konsumsi Pangan Kota Prabumulih masuk ke dalam kategori sangat baik dimana peningkatan skor diatas target capaian perjanjian kinerja. Keberhasilan ini diantaranya dipengaruhi



oleh upaya edukasi ke masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman di Tahun 2022 yang cukup gencar dilaksanakan.

Terlebih dengan adanya *Memorandum Of Understanding (MOU)* yang dilakukan dengan Tim Penggerak PKK Kota Prabumulih ikut serta memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemenuhan konsumsi dengan penganeekaragaman pangan dan gizi dari pekarangan sendiri. Di tahun 2022 sendiri Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan pendampingan, sosialisasi, edukasi dan promosi diantaranya melalui kegiatan:

- 1 Pemberdayaan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga
- 2 Pemberdayaan Pekarangan Melalui P2KP
- 3 Pembinaan Kader/Tim B2SA
- 4 Pemeliharaan Obor Pangan Lestari
- 5 Penilaian Lomba Penilaian Halaman Asri, Indah dan Nyaman
- 6 Promosi/Ekspose Produk Pangan Segar/Olahan
- 7 Pengembangan budidaya jahe merah
- 8 Pengembangan Sayuran di Lahan Pekarangan

#### **Sasaran 4.**

#### **“Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah”**

Pencapaian sasaran strategis 4 (empat) meliputi 2 (dua) indikator yaitu: (1). Cakupan Informasi Stabilitas Harga Pangan, dan (2). Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun,dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



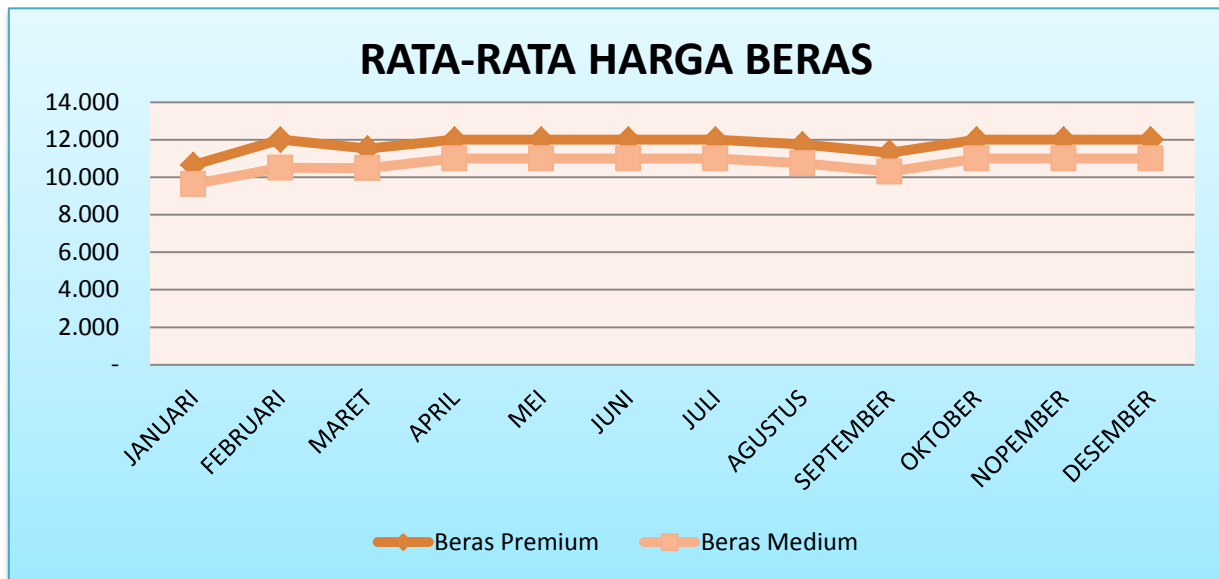
**Tabel 3.8**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2019	Realisasi 2019	Tahun 2020	Realisasi 2020	Tahun 2021	Realisasi 2021	Tahun 2022	Realisasi 2022	Tahun 2023
1	Cakupan Informasi Stabilitas Harga Pangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun	Ton	13,25	10	9,51 (95%)	13	9.484 (73%)	13	0 (0%)	13	0 (0%)	13

Capaian kinerja nyata indikator: “Cakupan Informasi Stabilitas Harga Pangan adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %. Hasil Pemantauan Harga Pangan Pokok (Beras) selama 48 minggu selama tahun 2022 dengan koefisien keragaman sepanjang tahun 2022 sebesar 3,8%. Angka ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan utama yaitu beras masih dalam kategori stabil. Pada umumnya fluktuasi/ lonjakan harga terjadi hanya bersifat sementara yaitu pada hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga biasanya mulai terlihat ketika masyarakat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan puncaknya menyambung Hari Raya Idul Fitri. Selain HBKN, fluktuasi harga yang terjadi tiap tahun karena adanya pergeseran nilai mata uang dimana harga beberapa komoditi pangan pokok tertentu dipengaruhi oleh perkembangan harga pasar internasional.

Jenis beras yang umumnya diminati masyarakat Kota Prabumulih yaitu beras dengan kualitas sedang seperti merk raja platinum, topi koki, rangkong dan sebagainya. Koefisien keragaman menggambarkan perkembangan stabilitas harga pangan pokok di tingkat konsumen (komoditi beras) yang dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

**Gambar 3.1**  
**Grafik rata-rata Harga beras sepanjang Tahun 2022**



Perkembangan harga beras diatas terlihat bahwa harga beras pada awal tahun 2022, rata-rata harga beras medium terendah berada pada angka Rp.9.629,- dan rata-rata harga beras medium tertinggi adalah 11.000,-. Rata-rata harga beras premium terendah berada pada angka Rp.10.629,- dan rata-rata harga beras premium tertinggi adalah 12.000,-.

Sedangkan Capaian kinerja indikator kedua yaitu: Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 60 Ton dalam 5 (Lima) Tahun, adalah sebesar 0 Ton dari target sebesar 13 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0 %. Capaian yang belum maksimal ini dikarenakan Untuk tahun 2022 total cadangan pangan Pemerintah Kota Prabumulih yang tersimpan di Gudang Bulog tetap yaitu 32,44 Ton.

Berdasarkan Surat dari Perum BULOG Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyatakan bahwa untuk sisa beras yang ada di Gudang BULOG sebesar 32, 244 Ton dimana beras yang dititipkan sebelum tahun 2020 sebesar 22,760 Ton yang tidak disepakati untuk dilakukan addendum penyesuaian harga agar segera diambil atau disalurkan, apabila belum disalurkan dan tidak dilakukan addendum tidak



dapat melakukan pengadaan atau pembelian beras di tahun 2022 dan tahun selanjutnya.

Oleh karena itu Kegiatan Cadangan Pangan Kota Prabumulih tidak dapat dilaksanakan untuk pengadaan terbentur surat dari Perum BULOG tersebut dan untuk penyaluran belum adanya anggaran untuk penyaluran seperti sewa angkut dan biaya ganti kemasan serta pembelian karung ganti kemasan yang semula dianggarkan di APBD Perubahan namun belum disetujui.

Untuk mempermudah proses penyaluran perlu dilakukan revisi PERKADA yang ada sebagai dasar hukum dalam proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pada proses revisi PERKADA akan dilakukan pada Tahun 2023.

Jumlah Cadangan Pangan (Beras) Pemerintah Kota sampai dengan tahun 2020 digambarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.9**  
**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Sampai dengan Tahun 2022**

No	Tahun	Pengadaan (Kg)	Jumlah (Kg)	Penyaluran (Kg)	Total Jumlah (Kg)
1	2013	11.610	11.610	11.610	0
2	2014	5.055	5.055	4.815	240
3	2015	4.550	4.790	-	4790
4	2016	-	4.790	-	
5	2017	4.575	9.365	-	9.365
6	2018	3.885	13.250	-	<b>13.250</b>
7	2019	9.510	<u>22.760</u>	-	<b>22.760</b>
8	2020	9.484	32.244	-	<b>32.244</b>
9	2021	-	32.244	-	<b>32.244</b>
10	2022	-	32.244	-	<b>32.244</b>
		<b>48.669</b>		16.425	

Tahun 2022 adalah tahun ke 4 Pelaksanaan Renstra 2018-2023, capaian kinerja indikator Volume Cadangan Pangan Pemerintah tahun ini adalah sebesar 0 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Ketahanan Pangan maka capaian kinerjanya mencapai 30,24 %.



Kuota Minimum Cadangan Pangan Pemerintah Kota mengacu kepada kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih. Jumlah Total beras Cadangan Pangan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 48,669 Ton dan telah disalurkan sebanyak 16, 425 Ton. Total Cadangan pangan yang tersimpan di gudang BULOG yaitu 32,224 Ton (45,16%) dari Total Kuota Minimum Kota Prabumulih. Oleh karena itu kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diharapkan akan memenuhi kuota yang diharapkan beberapa tahun mendatang mengacu kepada capaian Tahun akhir Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama Tahun 2022 pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Prabumulih dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih dengan nilai adalah sebesar Rp. 4.495.973.463 dan DAK Non Fisik sebesar Rp. 600.000.000. Jadi Total Keseluruhan Rp.5.095.973.463 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.666.551.383 atau dengan serapan dana APBD mencapai 77,26 %. Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada TA 2022. Untuk Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer tidak ada anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih**  
**Sampai dengan 31 Desember Tahun 2022**

No. Urut	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Lebih/Kurang (Rp)
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	5.095.973.463	4.666.551.383	91,57	429.422.080
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.753.673.463	4.392.251.383	92,40	361.422.080
5.1.1	Belanja Pegawai	2.833.907.463	2.623.651.213	92,58	210.256.250
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.919.766.000	1.768.600.170	92,13	151.165.830
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	342.300.000	274.300.000	80,13	68.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	342.300.000	274.300.000	80,13	68.000.000
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.095.973.463)	(4.666.551.383)	91,57	(429.422.080)
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(5.095.973.463)	(4.666.551.383)	91,57	(429.422.080)



#### **4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA**

Terkait Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan kota Prabumulih, ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih antara lain:

##### **1. Permasalahan dan Kendala**

- i. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Prabumulih tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA) sesuai dengan pola pangan harapan untuk menunjang hidup sehat dan produktif. Pola Konsumsi masyarakat sebagian besar kepada kuantitas (kenyang) dan bukan kepada kualitas (gizi) sehingga konsumsi masyarakat masih bertumpu pada beras dan terigu.
- ii. Cadangan Pangan Pemerintah Juga Belum memenuhi Kuota Minimum mengacu kepada kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih. Jumlah Total beras Cadangan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 48,669 Ton dan telah disalurkan sebanyak 16,425 Ton. Total Cadangan Pangan Pemerintah yang tersimpan di gudang BULOG yaitu 32,244 Ton (45%) dari Total Kuota Minimum Kota Prabumulih Harga pangan berada dalam kondisi cukup stabil dan berfluktuasi menjelang Hari Besar keagamaan Nasional (HBKN). Berdasarkan Surat dari Perum BULOG Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang menyatakan bahwa untuk sisa beras yang ada di Gudang BULOG sebesar 32, 244 Ton dimana beras yang dititipkan sebelum tahun 2020 sebesar 22,760 Ton yang tidak disepakati untuk dilakukan addendum penyesuaian harga agar segera diambil atau disalurkan, apabila belum disalurkan dan tidak dilakukan addendum tidak dapat melakukan pengadaan atau pembelian beras di tahun 2022 dan tahun selanjutnya. Oleh karena itu Kegiatan



Cadangan Pangan Kota Prabumulih tidak dapat dilaksanakan untuk pengadaan terbentur surat dari Perum BULOG tersebut dan untuk penyaluran belum adanya anggaran untuk penyaluran seperti sewa angkut dan biaya ganti kemasan serta pembelian karung ganti kemasan yang semula dianggarkan di APBD Perubahan namun belum disetujui. Untuk mempermudah proses penyaluran perlu dilakukan revisi PERKADA yang ada sebagai dasar hukum dalam proses penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pada proses revisi PERKADA akan dilakukan pada Tahun 2023.

- iii. Harga pangan pokok yang dipantau sepanjang tahun berada dalam kondisi cukup stabil dan hanya berfluktuasi rendah menjelang Hari Besar keagamaan Nasional (HBKN).
- iv. Pelaksanaan Pemetaan Masyarakat Rentan Pangan dan Tahan Pangan masih belum menjangkau keseluruhan Kecamatan di Kota Prabumulih.
- v. Pengawasan standar mutu keamanan pangan segar di Kota Prabumulih belum optimal. Terlebih lokasi Kota Prabumulih yang strategis sehingga mobilitas barang masuk dan keluar cukup tinggi membutuhkan pengawasan yang lebih intens.
- vi. Selanjutnya adalah Sistem informasi dan data ketahanan pangan belum optimal karena masalah keterbatasan SDM, sarana prasarana dan keterbatasan anggaran.
- vii. Belum berkembangnya teknologi dan industri pangan berbasis sumber daya pangan lokal dan produk pangan alternatif berbasis sumber daya pangan local.

#### **4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN SARAN UNTUK PERIODE YANG AKAN DATANG**

- a. Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan promosi tentang pola Konsumsi pangan beragam, bergizi Seimbang dan



- Aman (B2SA) kepada masyarakat dan Diversifikasi Pangan dan Gizi masyarakat terutama kepada produk non beras dan terigu;
- b. Penambahan kuota Cadangan pangan pemerintah Kota untuk memenuhi kuota minimum Kota Prabumulih mengacu kepada Permentan 65 Tahun 2010 dan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 257/1869/DKPP/2018, terutama untuk mensubstitusi kekurangan capaian tahun lalu.
  - c. Perlu adanya upaya stabilisasi harga pangan utama dengan penguatan Kelembagaan Pangan melalui TTI (Toko Tani Indonesia). Penetrasi Beras di pasar lokal diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan pokok masyarakat Kota Prabumulih. Upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan segar menjelang HBKN ditujukan untuk ringankan beban masyarakat melalui operasi pasar produk pangan segar seperti Cabai, Bawang, Telur dan Ayam.
  - d. Peningkatan pagu untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran pemetaan yang belum dilaksanakan di tahun 2021 dan 2022.
  - e. Dirasakan sangat penting untuk peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar, Registrasi, Rekomendasi dan Sertifikasi produk pangan segar di Tahun Anggaran selanjutnya.
  - f. Perlu peningkatan akses terhadap data dan informasi pangan kepada sektor publik melalui aplikasi berbasis online yang didukung oleh Sumber Daya Manusia serta sarana/prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan dinas serta perangkat lunak.
  - g. Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan dan fungsi kelembagaan pangan seperti kelompok tani, UKM, koperasi untuk mendukung pembangunan kemandirian pangan. Kemitraan antar lembaga perlu didorong untuk menumbuhkan usaha dalam bidang pangan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Kota Prabumulih ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Prabumulih.



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH INSPEKTORAT DAERAH

GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LT. 7 & 8  
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 12KEL. SINDUR KEC. CAMBAI KODE POS 31141  
PRABUMULIH – SUMATERA SELATAN

Prabumulih, 29 Agustus 2023

Nomor : 700/344.X.P/Inspektorat.II/2022  
Sifat : Rahasia  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Dinas  
Ketahanan Pangan Kota  
Prabumulih

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas Ketahanan Pangan**  
Kota Prabumulih  
di-  
Prabumulih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Walikota Prabumulih Nomor: 700/437/ST/Inspektorat/2023 tanggal 17 Juli 2023 telah dilaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dengan hasil yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

  - a. Penilaian Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
  - b. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
  - c. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
  - d. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

3. Metodologi evaluasi yang digunakan adalah:
  - a. Cheklist pengumpulan data dan informasi;
  - b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
  - c. Observasi;
  - d. Studi dokumentasi.
  
4. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Internal.  
 Dokumen yang dievaluasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah Dokumen Laporan Kinerja (LKj) 2022, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023, Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2022, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi (Renaksi) Rencana Kerja (Renja) tahun 2023.
  
5. Hasil evaluasi terhadap dokumen dimaksud dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, telah mewujudkan good governance, Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu
2	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/ coordinator
4	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.

			Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon2/unit kerja
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar, khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Dari hasil evaluasi atas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2022 tersebut diperoleh nilai sebesar 79,77 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 100,00 atau 79,77 % dengan kategori sangat baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/ coordinator

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	24,08
b. Pengukuran Kinerja	30,00	27,07
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,00
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,63
Jumlah	100,00	79,77

Adapun uraian evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

a. PERENCANAAN KINERJA

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategi (Renstra) Perubahan 2018-2023, dokumen Rencana Kerja tahun 2022, dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan tahun 2023. Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi pemenuhan, kualitas dan penerapannya. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar 24,08 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 80,26 %. Simpulan hasil evaluasi atas komponen

perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a) *Penilaian Pemenuhan*

Hasil evaluasi atas dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100 %. Pedoman teknis perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek telah Memenuhi, dokumen perencanaan aktivitas dan dokumen perencanaan anggaran Telah Mendukung kinerja.

b) *Penilaian Kualitas*

Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan, dipublikasikan tepat waktu, menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, kualitas rumusan hasil (*Tujuan/Sasaran*) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable*-tidak sering diganti dalam 1 priode perencanaan strategis), Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta telah selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*), perencanaan kinerja telah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja dan setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

Hasil evaluasi atas kualitas dokumen Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai sebesar 7,36 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 81,82 %.

c) *Penilaian Implementasi*

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track, terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik, setiap unit/satuan kinerja telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan setiap pegawai telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hasil evaluasi atas sub komponen implementasi Renstra menunjukkan nilai sebesar 10,71 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 71,43 %.

## b. PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan pengukuran, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta keandalan dalam pengumpulan data kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 27,07 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 90,24 %

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

### a) Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah menetapkan Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar 5,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 83,33 %.

### b) Kualitas Pengukuran

Pimpinan sudah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi), Hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 7,07 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 78,57 %.

### c) Implementasi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional, Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi, mempengaruhi penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja, mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja, mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Pencapaian target kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment serta dalam pemberian tunjangan kinerja. Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar 15,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 100 %.

## c. PELAPORAN KINERJA

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 13,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 86,67 %.

*Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:*

a) Pemenuhan Pelaporan Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah menyusun dokumen kinerja secara berkala, diformalkan, direviu, di publikasikan dan disampaikan tepat waktu.

Hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan menunjukkan nilai sebesar 3,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau 100 %.

b) Penyajian Informasi Kinerja Laporan Kinerja

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja level nasional (Bencmarch kinerja), belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) Hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar 2,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 4,50 atau 55,56 %.

c) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggungjawab), Penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 100 %.

d. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan telah sepenuhnya memuat pelaksanaan, kualitas dan pemanfaatan evaluasi Hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal menunjuk kan nilai sebesar 15,63 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau 62,50 %.

*Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:*

a) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Internal

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih telah membuat pedoman teknis evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, dilaksanakan secara berjenjang. Hasil evaluasi atas pemenuhan evaluasi menunjuk kan nilai sebesar 5,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 5,00 atau 100 %.

b) Kualitas Evaluasi

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar oleh SDM yang memadai, dengan pendalaman yang memadai, pada seluruh unit kerja/perangkat daerah, menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)

Hasil evaluasi atas kualitas evaluasi menunjuk kan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau 100 %.

c) Pemanfaatan Evaluasi

Belum sepenuhnya rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti, belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi atas pemanfaatan evaluasi menunjuk kan nilai sebesar 3,13 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,50 atau 25 %.

e. REKOMENDASI

Atas hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tersebut bahwa:

a) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih belum menindak lanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya dan belum menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. *Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.*

b) Terhadap permasalahan sebagaimana yang tertulis di atas, agar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih untuk:

1. Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
2. Belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja level nasional (Bencmarch kinerja), belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
3. Belum sepenuhnya rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

ditindaklanjuti, belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

  
INSPEKTUR DAERAH KOTA PRABUMULIH  
ANDRA BANGSAWAN, SH, MM  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 197005091992031001

Tembusan :

Yth. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)